

ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN AKRUAL BASIS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

**Onis Maniani
Paulus K. Allo Layuk
Syaikhul Falah**

ABSTRACT

The purpose of this research is to; 1) Analyzing the influence of internal control, the quality of human resources and the application of the accrual basis simultaneously on the quality of the Papuan Provincial Government's financial reports. 2) Analyzing the influence of internal control, the quality of human resources and the application of the accrual basis partially on the quality of the Papuan Provincial Government's financial reports, 3) Analyzing the influence of variables that have a dominant influence on the quality of the Papuan Provincial Government's financial reports. The method used in this research is multiple regression analysis. Where this analysis method is a statistical method used to test the relationship between several independent variables to one dependent variable.

The results of the analysis show that internal control, quality of human resources and the application of the accrual basis simultaneously affect the quality of regional financial reports in Papua Province. This means that the higher the internal control, the quality of human resources and the application of the accrual basis can be understood and implemented properly, the quality of the local government financial reports produced will be better. On the other hand, if the internal control, quality of human resources and the application of the accrual basis do not meet accounting policies, it can lead to poor quality of local government financial reports. Internal control, quality of human resources and the application of the accrual basis partially affect the quality of regional financial reports in Papua Province. This means that, if internal control is carried out properly, the quality of the financial reports produced will increase, as well as the quality of human resources and the application of the accrual basis. The variable quality of human resources has a dominant influence on the quality of regional financial reports in Papua Province. With the existence of human resources who have competence, especially in the field of accounting or finance, it will be able to encourage the realization of the presentation of quality government financial reports to increase the accuracy and accountability of local government financial management.

Keywords: Internal Control, Human Resources Quality, Financial Report Quality

PENDAHULUAN

Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi.

Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005. Undang-Undang ini telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang desentralistik partipatoris (Mardiasmo, 2014). Otonomi yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan sesuai PP 71 Tahun 2010 tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktek manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat menghasilkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2014:154) akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Halim (2012:186) meningkatkan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016:20). Peningkatan kualitas pengendalian intern yang semakin baik dapat mengurangi keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik. Unsur-unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM), di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pelaksanaan dari pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai, bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cianjur berkesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Cianjur .

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus

disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAP yang ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian sekarang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah tersebut SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menyusun laporan keuangan akan berkualitas bila mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013).

Selain ketiga hal di atas yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kebijakan Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), hal yang terpenting lainnya ialah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti, 2014). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan

keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Indriasari, 2016).

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi di dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di entitas pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas. Hal ini didukung dari penelitian Choirunisah (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Syarifuddin (2014) yang menunjukkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sejak Tahun 2018 adalah berbasis akrual dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2020 adalah berbasis akrual dan BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Tidak memberikan pendapat (*disclaimer*), pengelolaan yang paling mempengaruhi opini BPK adalah Pengelolaan Aset, Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Rendahnya penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan ini menunjukkan ketidaksiapan Sumber Daya Manusiannya dalam menerapkan Aplikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan SAP.

Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan seyogyanya dapat diandalkan kemampuannya untuk memahami dan menerapkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sesuai PP 71 Tahun 2010 baik pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas pelaporan maupun pada unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Entitas Akuntansi (penyusun laporan konsolidasi), kenyataannya Sumber Daya Manusia yang ada pada OPD Dinas-dinas masih kurang efektif seperti yang diharapkan yaitu masih kurangnya tenaga yang professional dan kurangnya tenaga yang berlatar belakang akuntansi. Kualitas laporan keuangan yang dinilai kualitasnya oleh BPK adalah Laporan Keuangan konsolidasi yaitu kumpulan laporan keuangan yang dikonsolidasikan dari OPD. Dengan demikian laporan keuangan yang disusun oleh OPD adalah merupakan sumber data pada penyusunan laporan konsolidasi dengan demikian ketidak mampuan penyusunan laporan keuangan pada tingkat OPD akan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Konsolidasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Amriani (2018) menunjukkan bahwa pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Tantriani Sukmaningrum dan Puji Harto (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "Analisis Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua".

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk: 1) Menganalisis pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2) Menganalisis pengaruh pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan

akrual basis secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 3) Menganalisis pengaruh variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Harapan (*Grand Theori*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu Stewardship theory yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Thorton, 2009). Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/ principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah di Inpektorat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Dian Indira, 2017).

Teori Kegunaan-Keputusan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan (*decision usefulness theory*) informasi akuntansi, menurut Kiswara (2011) telah menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Dalam hal ini Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dalam suatu laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No.2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan dan nilai reliabilita.

Nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kualitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan/bias serta mewakili apa yang akan digambarkan.

Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan prediksinya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), Nilai umpan balik (*feed-back Value*) dan nilai prediktif (*predictivevalue*) dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu menggambarkan yang senyatanya (*representaation faithfulness*), netralitas (*neutralitas*) dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Terkait kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB) tersebut, di Indonesia pada khususnya, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah yang berdasar kepada Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang memiliki otoritas tertinggi. Pemerintah Indonesia mengenal hirarki Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai acuan utama yang memiliki otoritas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam UU No.71/2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.2. Hanya saja standar akuntansi pemerintah menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pengawasan Intern

Terdapat dua ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang menggariskan bahwa dipandang perlu untuk memberdayakan pengawasan oleh lembaga Negara, lembaga politik dan kemasyarakatan. Hal ini dihubungkan oleh adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan Negara, dan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka peran dan fungsi pengawasan, pengadilan dan pemeriksaan menjadi sangat strategis.

Banyak kasus di sebuah perusahaan atau organisasi tidak dapat menyelesaikan seluruhnya karena tidak ditepati waktu penyelesaian, anggaran berlebihan dan kegiatan yang lain menyimpang dari rencana semula maka disini dibutuhkan suatu fungsi pengawasan antara pengawasan dan pemrosesan merupakan hal yang sangat erat sekali. Pengawasan merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menyebutkan bahwa Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan intern di daerah dilakukan oleh inspektorat pada daerah tersebut yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan Intern merupakan langkah sistem atau alat yang menyediakan jaminan atas keberhasilan sasaran kinerja suatu kegiatan (Halim 2012). Pengawasan Intern adalah sebagai berikut: Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit satuan kerja dilingkungan organisasi dan unit atau satuan kerja masing-masing (Nawawi 2000). Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan intern merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat internal yang ditunjuk oleh pejabat daerah dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kata kualitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kualitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang (Sari, 2014).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Namun saat sekarang banyak sumber daya manusia yang bukan berlatar belakan pendidikan akuntansi, tetapi krena sering mengikuti pelatihan dan sebagainya sehingga mampu untuk paham dan mengerti mengenai akuntansi, itu juga dapat dikatakan dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas.

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugastugas yang dibebankan kepadanya (Indriasari, 2016). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2012).

Penerapan Akrua Basis

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan

disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dapat disimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2003 tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan penting baik pada organisasi swasta maupun pada pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan di audit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Kerangka Pikir

Pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan PP No 71 Tahun 2010 diharapkan mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kejelasan pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan PP No 71 Tahun 2010 terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas SDM dan Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah yang baru sudah mengatur tentang akuntansi berbasis akrual ini. Laporan keuangan yang disajikan jika sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal artinya laporan keuangan telah memuat informasi yang disajikan secara jujur dan wajar. Keefektifan sistem pengendalian internal di perlukan untuk membantu aktivitas organisasi dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga berperan penting dalam ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan proses pengolahan datanya. Semakin baik tingkat teknologi yang di gunakan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas (Tampubolon dan Basid, 2019). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya kompetensisumber daya manusia yang baik, maka dapat menghemat waktu pembuatan pelaporan keuangan (Apriansyah, dkk, 2020). sumber daya yang kompeten sangat di butuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Suparno, 2017). Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengawasan Intern, Kualitas SDM dan Penerapan Akrua Basis Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia, fungsi pengawasan internal dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Pembangunan (Irjenbang). Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengawasan Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sutaryo (2011), sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Guy *et al* (2002:67), Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual diharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan informasi penentuan *cost* dalam rangka program penghematan (*cost saving*) maupun informasi atas aset sehingga mampu memberikan informasi akurat terkait peningkatan pendapatan (*revenue generating*). Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik terkait dampak kebijakan pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasional dan mendorong peningkatan integritas. Kerangka kerja akuntansi berbasis akrual menjadi sangat penting untuk menentukan kos total (*full cost*) aktivitas pemerintah secara sistematis yang pada akhirnya berperan penting dalam pencapaian kerangka kerja manajemen kinerja sektor publik yang lebih efisien dan efektif (Irawan, 2013).

H4: Penerapan Akrua Basis berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kantor OPD yang berada di Provinsi Papua. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena dianggap mampu untuk merepresentasikan bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian/ wakil populasi yang diteliti). Teknik pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti menurut Sekaran (2013). Penetapan sampel ini ditentukan karena mempunyai tugas melakukan akuntansi OPD dan menyiapkan laporan keuangan sebatas unit kerjanya masing-masing sedangkan Bagian Keuangan BPKAD adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi yang dihimpun berdasarkan laporan keuangan masing-masing OPD yang akan dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 35 OPD. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 orang dengan ketentuan dari masing-masing OPD terdiri dari 3 orang. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Dimana metode analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b₀ = Konstanta
- X₁ = Pengawasan Intern
- X₂ = Kualitas SDM
- X₃ = Penerapan Akrua Basis
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi
- e = Kesalahan (error)

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas SDM dan Penerapan Akrua Basis Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji F pada pengujian hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan intern, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh terhadap variabel terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Ppapua. Hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung 14,349 > nilai Ftabel 2,701. Karena nilai Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Hal ini berarti semua variabel independen (pengawasan intern, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen (kualitas laporan keuangan). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Amriani (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel pengawasan intern, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh terhadap variabel terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengawasan internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila pengawasan internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat menimbulkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik.

Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji frekuensi yang dilakukan mengenai variabel pengawasan intern pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 8 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,15 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berjalan dengan baik. Adanya pengawasan intern yang dilakukan pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan yang disusun. Pengujian pengaruh variabel pengawasan intern terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah dengan

menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variable pengawasan intern sebesar 0,012 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan intern secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya bahwa, dengan pengawasan intern yang optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irene Fransisca Ponamon (2015) yang menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan pengawasan intern yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan intern telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengawasan intern juga menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan temuan BPK-RI atas kurangnya pengawasan intern yang mengindikasikan terjadinya kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/daerah di Indonesia. Untuk LKPD Provinsi Papua, BPK memberikan opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2017-2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan intern di pemerintahan daerah Provinsi Papua bisa dikategorikan baik. Semakin pengawasan intern pemerintah daerah maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menjaga integritas data yang dimiliki agar tetap akurat, konsisten dan mencerminkan kualitas data merupakan

tanggung jawab suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian internal terhadap entitasnya tersebut.

Selain itu, Ketepatan input dan posting data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjamin kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi. Adanya sistem otorisasi dan pembatasan akses terhadap segala bentuk pemrosesan transaksi oleh pihak yang berwenang akan menjamin data keuangan dalam suatu organisasi tetap aman. Dilaksanakannya perumusan dalam penyusunan kebijakan yang sehat tentang pengawasan intern sangat diperlukan sebagai pendukung penerapan pengawasan intern dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, setiap alat ukur dari pengawasan intern yang dilaksanakan secara optimal akan berimplikasi pada peningkatan kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu entitas yang dalam hal ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua.

Berdasarkan auditing berbasis ISA (*International standards on accounting*) membagi lima jenis pengendalian dalam suatu entitas, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian dan pemantauan. Penyebaran kuisisioner yang telah dilakukan di 35 OPD di Provinsi Papua menunjukkan bahwa kurangnya penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan dan tidak adanya pemeriksaan berkala dan Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut tidak dipantau dan dalam pelaksanaannya tidak diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif dimana pimpinan OPD tidak selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang. sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Selanjutnya sistem pengendalian yang tidak dilakukan oleh OPD dari segi lingkungan pengendaliannya yaitu terdapat pemisahan tugas yang tidak memadai. Diperlukan struktur organisasi dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan

analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji frekuensi mengenai variabel kualitas SDM pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 9 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 3,98 berada pada kategori setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dengan adanya kualitas SDM yang mendukung, maka kualitas laporan yang disusun akan menjadi lebih baik. Pengujian pengaruh variabel kualitas SDM terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel pendidikan dan pelatihan sebesar $0,001 < \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan di sebuah instansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Amriani (2018) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya menyadari bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengisi posisi dan jabatan pada bidang pengelolaan

keuangan suatu instansi, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menjalankan peranan dan fungsinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi kedepannya. Kompetensi sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai indikator serta alat ukur suatu pemerintahan dalam menilai seberapa efektif dan efisien melaksanakan tugas dan fungsi oleh sumber daya manusia dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau keuangan akan dapat mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis transaksi dan mengolah laporan keuangan dengan berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). Selain itu, uraian tugas dan wewenang pegawai (sumber daya manusia) yang jelas akan mendorong penyelesaian tugas secara optimal dan tepat waktu. Keikutsertaan pegawai dalam sebuah pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai mengenai pengelolaan keuangan daerah akan membantu dalam penyelesaian tugas sehari-hari dan membantu dalam memahami peraturan-peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian jika telah memenuhi unsur kualitatif (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) yang memadai maka akan berdampak pada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Sejalan dengan fakta yang ada di Provinsi Papua bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan-pelatihan dan juga sosialisasi kepada pegawai mengenai pengelolaan laporan keuangan, terdapat manfaat dari pelatihan dan sosialisasi yang terlihat dari

banyaknya responden yang setuju pada indikator pengetahuan dan sikap. Akan tetapi, di Provinsi Papua pemerintah tidak melakukan pengawasan lebih lanjut sehingga dapat dimungkinkan pegawai tidak mengasah keterampilan yang diberikan dari pelatihan dan sosialisasi. Di sisi lain, pengelolaan laporan didukung oleh adanya aplikasi pencatatan laporan keuangan sehingga pegawai merasa tidak perlu mengasah keterampilannya. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik. Kapasitas sumber daya manusia diukur dengan indikator pendidikan, tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman.

Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki. Jika pegawai memiliki tanggungjawab dan menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman maka kapasitasnya semakin baik dan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. Maka dari itu untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi. Hal ini juga mendukung teori *stewardship* bahwa sumber daya manusia yang tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasinya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik guna mencapai

tujuan organisasinya. Kompetensi tak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan tetapi bisa juga dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setempat dapat diperoleh. pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pengaruh Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji frekuensi mengenai variabel penerapan akrua basis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 6 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,11 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa, adanya penerapan akrua basis dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan adanya penerapan akrua basis dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melaporkan laporan keuangan. Pengujian pengaruh variabel penerapan akrua basis terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel SIPD sebesar 0,024 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,482. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akrua basis secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, dengan menerapkan basis akrua setiap OPD yang terdapat di Provinsi Papua, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan variable yang berpengaruh signifikan dikarenakan standar akuntansi berbasis akrua merupakan standar yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dibandingkan standar yang lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Amriani (2018) yang menyatakan bahwa penerapan akrua basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif penelitian ini, sebagian besar responden sepakat untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan dengan menggunakan SAP yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan ketentuan, menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keterandalan laporan keuangan. Meskipun dari pengamatan peneliti ternyata di beberapa OPD yang terdapat di Provinsi Papua masih banyak pegawai yang belum mengerti bahkan tidak mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual namun seharusnya dengan keterbatasan pengetahuan para pegawai tentang SAP berbasis akrual, para pegawai harus diberikan pelatihan terhadap pelaporan keuangan lebih sering lagi. Agar semua pegawai memperoleh pengetahuan yang lebih tentang SAP berbasis akrual dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga, menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik terkhusus pada pemerintah Provinsi Papua.

Suatu pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Pada penelitian ini, pemerintah daerah merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis akrual sehingga tingkat penerapan akuntansi akrual pada perangkat daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang dilakukan secara baik dan konsisten akan membuat segala kegiatan di pemerintah daerah akan berjalan secara efektif dan efisien, hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara tepat dan konsisten akan membawa dampak yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan diharapkan semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah.

Variabel yang berpengaruh dominan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengujian pengaruh variabel yang berpengaruh dominan menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil bahwa, variabel kualitas SDM memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai *standardized coefficient* sebesar 0,354 (35,4%), sedangkan variabel penerapan akrual basis memiliki pengaruh yang paling rendah dengan nilai *standardized coefficient* sebesar 0,244 (24,4%). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, kualitas SDM memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menjalankan peranan dan fungsinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi kedepannya. Kompetensi sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai indikator serta alat ukur suatu pemerintahan dalam menilai seberapa efektif dan efisien melaksanakan tugas dan fungsi oleh sumber daya manusia dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau keuangan akan dapat mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pada akhirnya, sumber daya manusia bagian akuntansi atau keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di pemerintah daerah Provinsi Papua, jika telah memenuhi unsur kualitatif (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) yang memadai maka akan berdampak pada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

KESIMPULAN

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pengendalian internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengawasan internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila pengawasan internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat menimbulkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik.
2. Pengendalian internal, kualitas SDM dan penerapan akrual basis secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa, apabila pengawasan intern dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat, begitu pula dengan kualitas SDM dan penerapan akrual basis.
3. Variabel kualitas SDM memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau keuangan akan dapat mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Berikut saran untuk berbagai pihak terkait hasil analisis data penelitian:

1. Pemerintah daerah Provinsi Papua diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan karena menyajikan informasi laporan keuangan secara wajar dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu bukan sebuah prestasi melainkan suatu kewajiban.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah Provinsi Papua, diharapkan dapat menyusun laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel agar mampu meningkatkan kompleksitas penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam PP No. 71/2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, internal audit serta variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syarifudin. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02*, Desember 2014, 14(25), 26–44.
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. 2020. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo*. *Jambi AccountingReview*, 1 (1).
- Bakar, Usman Abu, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*.
- Choirunisah, Fariziah. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)*. *Jurnal Laporan Keuangan*.
- Dian Indira Murti. 2017. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, Dan M., et al. 2002. *Auditing. Edisi Kelima. Jilid II. Penerjemah Sugiyarto*. Jakarta: Erlangga.
- Hadari, Nawawi. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi; Jakarta: Salemba Empat.
- Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Bandung: Study & Accounting Research. Vol. XI, No. 1.
- Indriasari, Desi. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Irawan, Surya, Arif. 2013. *Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA) atas Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah*.
- Irzal Tawaqal Suparno. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.2, No.4, Hal.125-135. dari file C:\Data (D)\UP\Matriks.
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)".
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 308/Kmk.012/ 2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah".
- Kiswara, Endang, 2011, *Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2)*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2012. *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* Vol. 6 No. 1.
- Mardiasmo, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Panamon, Irene Fransisca, 2015. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Manado*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- _____ Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah _____ Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”.
- _____ Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. Permadi, Angga Dwi, Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat) 2013
- Rukmi Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Volume 12, Nomor 2, Desember 2013, Hal 201-2014*.
- Sinarwati, Ni Kadek, dkk, 2018. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Sari, Novita, Lusi. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)*.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach*. New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014, *SPSS Untuk Penelitian*, Pustaka Baru: Jakarta
- Supomo, B. Dan N. Indriantoro, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sutaryo. 2011. “*Manajemen Aset Daerah*”. *Jurnal Akuntansi, Vol 1. No 2 (November 2011)*.
- Tampubolon, F. M. dan A. Basid, 2019. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Komputer Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta)*. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 3 (1), 55-65*.
- Thornton D, Deborah. 2009. *Stewardship in Government Spending: Accountability, Transparency, Earmarks, and Competition*, Policy Study, No. 09-1, Public Interest Institute.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, 2014. *Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem*

Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi (Volume 2 No:1 Tahun 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

_____ Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

_____ Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan.*

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah.*